

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al Rashid, Harun, 1987, "*Sekilas Tentang Jual Beli Tanah Berikut Peraturannya*", Ghalia Indonesia, Jakarta.

Effendi, Bachtiar, 1985, "*Pendaftaran Tanah di Indonesia Beserta Pelaksanaannya*", Alumni, Bandung.

Fuady, Munir, 1996, "*Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ke-3*", Cipta Aditya Bakti, Bandung.

G, Kartasasmita, dkk, 1986, "*Masalah Pertanahan di Indonesia*", PT. Bina AKsara, Jakarta.

Gautama, Sudargo, 1998, "*Tafsiran Undang-undang Agraria*", Citra Aditya Bakti, Bandung.

Harsono, Boedi, 2005, "*Hukum Agraria Indonesia Jilid I*", Djambatan, Jakarta.

Hermanes, 1994, "*Pendaftaran Tanah di Indonesia*", Yayasan Karya Darma Institut Ilmu Pemerintah, Jakarta.

Hukum Agraria Indonesia, 2002, "*Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Graria, Isi dan Pelaksanaannya*", Jakarta.

I.Sugiarto, 1994, "*Sistem Pembuktian Hak Atas Tanah di Indonesia, Seminar Pertanahan Nasional*", STPN, Yogyakarta.

Mudjono, 1992, "*Hukum Agraria*", Liberty, Jakarta.

Parlindungan, Ap, 1998, "*Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria*", Alumni Bandung.

Parlindungan, Ap, 2003, "*Tanya Jawab Hukum Agraria dan Pertanahan*", Bandung : Mandar Maju.

Ramulyo, Mohd. Idris, 1993, "*Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*", Sinar Grafika, Jakarta.

Suparni, Naniek, 2005, "*Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*", Jakarta, Rineka Cipta.

Sudiyat, Imam, 1981, "*Hukum Adat Sketsa Asas*", Liberty, Yogyakarta.

Iman Sudiyat, *Peta Hukum Waris di Indonesia*, Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Nasional (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1989).

Silandeho, John, 1994, "*Masalah Tanah Dalam Pembangunan*", Sinar Grafika, Jakarta.

Khisni, *Hukum Waris Islam*, Unissula Press.

Sayyid Sabiq, 2006 *Fiqih Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakrata Selatan

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, "*Metode Penelitian Hukum*", Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudjito, 1987, "*Prona, Pensertipkatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis*", Liberty, Yogyakarta.

Soerjono dan Abdurrahman, 1997, "*Prosedur Pendaftaran Tanah Hak Milik Hak Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan*", Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarsono, 1991, "*Hukum Kekeluargaan Nasional*", Rineka Jakarta.

Soimin, Soedharyo, 1994, "*Status Hak dan Pembebasan Tanah*", Sinar Grafika, Jakarta.

Sjarif, Surini Ahlan dan Elmiyah, Nurul, 2005, "*Hukum Kewarisan Perdata Barat*", Kencana, Jakarta.

Teger. F, 1995, "*Hukum Waris Buku ke-1*", Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tuntutan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, 1982, Yayasan Bina Husada Bina Sejahtera, Jakarta.

Usman, Suparman, 2003, "*Hukum Agraria Di Indonesia*", Fakultas Hukum UNTIRTA.

Wantjik Saleh. K, 1990, "*Hak Anda Atas Tanah*", Ghalia Indonesia, Jakarta.

Widjodipoerno, Soerojo, 1983, "*Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*", Gunung Agung, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Intruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia No.1 Tahun 2006 tentang ketentuan pelaksanaan PP No.37 Tahun 1997 tentang peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 / Nomor 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Jo. Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 1999 Jo. No. 71 Tahun 2008 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan HAT dan atau Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional no. 8 tahun 2012 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet Kerja 2014-2019.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP 24 Tahun 1997.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPN RI.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10/SE/X/2014 tentang Masa Peralihan Nomenklatur Dan Struktur Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Rencana Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031.

Kamus

Echols, Jhon. M dan shadilyu Hasan 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, An English Dictionery, Penerbit PT Gramedia, Jakarta

Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta

Internet :

Erfan Rusdi, 2008, "Peta Lokasi Kota Semarang", www.semarang.go.id.

Irma Devita, 2007, "Jual Beli dan Balik Nama Sertipikat", www.devita.co.id.

Risnanto, 2007, "Dampak Sertifikasi Tanah Terhadap Tanah dan Kepemilikan Tanah Skala Kecil"

<http://us.il.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/66.gif>

Raimond Flora Lamandasa, S.H., 2007, "Sertipikat Sebagai ALat Bukti Hak Atas Tanah". www.flora.com.

Rudi Indrajaya, S.H., Sp.N./Notaris, PPAT, 2008, "Hukum Pajak Tanah Warisan". <http://www.bktrn.org/public/KKPN%20irul.pdf>.